

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi dan perkembangan teknologi memberikan beberapa dampak positif hampir di semua sektor, baik itu di sektor publik maupun sektor swasta. Pada revolusi industri keempat atau industri 4.0 banyak bermunculan teknologi baru seperti Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Blockchain (Falwadiya & Dhingra, 2022). Blockchain merupakan salah satu teknologi yang memberikan konsekuensi “mengganggu” bagi masyarakat maupun ekonomi di masa depan (Cagigas, et al., 2020). Menurut Lee, et.al (2020) teknologi blockchain dianggap mengganggu karena teknologi ini tanpa henti terus meningkat dan akhirnya menggantikan teknologi sebelumnya serta membawa perubahan besar dalam menyelesaikan suatu proses.

Pada awalnya, teknologi blockchain diterapkan di dunia bitcoin namun terjadi paradigma yang menjadikan teknologi blockchain dapat digunakan pada berbagai aspek dan sektor. Blockchain sudah diterapkan di sebagian negara dan di beberapa sektor. Mayoritas negara yang menerapkan blockchain adalah negara-negara maju dan sektor privat merupakan sektor yang paling banyak menggunakan teknologi blockchain (Ning, et al., 2021). Beberapa penerapan blockchain di sektor privat dilakukan di industri layanan makanan di Korea Selatan (Jang, et al., 2023), retail supply chain (Mukherjee, et al., 2023), perusahaan manufaktur di Jordan (Jum'a , 2023),

dan supermarket di US (Nuseir, 2021). Sedangkan penerapan blockchain di sektor publik diantaranya dilakukan di China (Ning, et al., 2021), Eropa (Falwadiya & Dhingra, 2022), Dubai, Republic of Moldova, Estonia, USA, Sweden, Singapore, dan UK (Khan, et al., 2022).

Di Indonesia, penerapan teknologi blockchain sudah dilakukan pemerintah dalam bidang perpajakan. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kehadiran aplikasi Online Pajak yang menggunakan teknologi blockchain menjadi salah satu cara untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih transparan dan aman untuk masyarakat (Kominfo, 2018). Selain itu, dalam Seminar Business & Economics National Conference: Blockchain & Prospek Bisnis Masa Depan di Unika Atmajaya, Jakarta 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aplikasi e-government berbasis blockchain dan blockchain untuk e-budgeting (Kominfo, 2019). Menurut Nugraha (2022) teknologi blockchain dapat digunakan dalam pengelolaan data instansi negara. Selain itu, teknologi blockchain akan membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga akan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-government (Kassen, 2022). Teknologi blockchain memberikan fasilitas interaksi langsung antara pemerintah dan warga negara dan menyediakan layanan tanpa administrator (Keyser, 2017).

United Nations (UN) E-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (PANRB, 2022). Dimana dari survei yang dilakukan tersebut, Indonesia naik 11 peringkat dari urutan ke 88. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa digitalisasi harus segera dilaksanakan terutama dalam pemerintahan agar pelayanan publik semakin maju. Untuk meningkatkan SPBE maka pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan aplikasi “Jogja Smart Service (JSS)”. Dimana aplikasi JSS masuk kedalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP tahun 2023 (KemenPANRB, 2023). Aplikasi tersebut diluncurkan dalam upaya memberikan pelayanan langsung kepada semua masyarakat di Kota Yogyakarta. Selain itu, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan nilai Baik dengan indeks SPBE 3,36 pada Smart Government. Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan Masterplan pengembangan Smart City berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026. Strategi Masterplan pengembangan Smart City tersebut yang terdiri dari *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment* diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks SPBE Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kota

Yogyakarta karena telah berfokus pada bidang digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Pratiwi, (2022) teknologi blockchain dapat memberikan sebagian besar manfaatnya bagi akuntan. Blockchain memberikan suatu inovasi untuk mencatat, mengolah, dan mengarsipkan transaksi serta informasi keuangan yang akan mengubah perspektif profesi akuntansi untuk membentuk kembali ekosistem bisnis yang terintegrasi (Liu, et al., 2019). Teknologi blockchain memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi fungsi akuntansi dan audit. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat dan menyimpan aset, kewajiban, dan transaksi serta berfungsi sebagai pendekatan untuk mencatat arus kas dan merekonsiliasi akun (Rahmawati & Subardjo, 2022). Adanya teknologi blockchain akan memberikan manfaat bagi akuntan, dimana akuntan tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk rekonsiliasi karena teknologi blockchain akan membuat akuntan fokus pada perencanaan dan penilaian daripada hanya pencatatan, dengan implementasi teknologi blockchain memungkinkan akuntan memiliki catatan yang sama dengan pelanggan. (Bandaso, et al., 2022). Teknologi blockchain dapat menciptakan keefisienan dan keefektifan dalam melakukan siklus akuntansi dari mulai adanya transaksi hingga penyusunan pelaporan keuangan.

Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sangat penting karena akan memberikan peningkatan penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) yang

dapat menunjang kinerja organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi perusahaan dan bisnis. Menurut Devi & Dharmadiaksa, (2021) Sistem informasi akuntansi adalah komponen penting dari suatu sistem informasi, hal ini memungkinkan SIA untuk dapat mengolah sebuah informasi yang didapatkan dari data mentah keuangan yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk kepentingan eksternal maupun internal organisasi. Sistem informasi akuntansi yang efektif sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan operasi kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan, sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen (Prananda & Datu, 2017). Teknologi blockchain dapat membantu dalam pengelolaan transaksi di dalam sistem informasi akuntansi manajemen dengan beberapa cara, seperti meningkatkan keamanan data, transparansi, dan efisiensi proses akuntansi (Luthfiyyah & Dewayanto, 2023). Menurut Huy & Phuc, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari perspektif akuntan, teknologi blockchain memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

Adanya kemajuan teknologi seperti saat ini, Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan ide, solusi ataupun anjuran untuk terus

mengembangkan ilmu dan teknologi yang ada. Hal ini tertuang dalam Surah Al-Jatsiyah Ayat 13 dan Hadis Riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Yang artinya: “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al Jatsiyah: 13).

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.” (HR Ahmad).

Pengadopsian teknologi baru tidak selalu berhasil, dimana terkadang pengadopsi teknologi dapat berujung pada kegagalan. Menurut Tanaamah, et al., (2021) pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa 75% adopsi suatu teknologi sering berujung pada kegagalan. Pengadopsian sistem e-Government merupakan salah satu contoh kegagalan dalam pengadopsian teknologi. Di negara berkembang termasuk Indonesia banyak lembaga pemerintah mengalami hambatan bahkan gagal dalam menggunakan sistem e-Government (Sudarsono & Lestari, 2018). Kegagalan dalam adopsi teknologi dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu rendahnya penerimaan pengguna suatu teknologi.

Penerimaan atau adopsi teknologi didefinisikan sebagai "Niat untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi baru". Salah satu teori

penerimaan dan penggunaan teknologi adalah *Unified theory of acceptance and use of technology* (UTAUT). Teori UTAUT dikembangkan oleh Venkatesh et al pada tahun 2003. Menurut Reyes-Mercado, et al. (2023) UTAUT menambahkan pengaruh sosial sebagai proksi dari norma sosial dan memfasilitasi kondisi untuk menjelaskan niat perilaku dan perilaku penggunaan.

Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) mengidentifikasi beberapa elemen untuk memprediksi niat dan perilaku dalam menggunakan teknologi dengan delapan variabel dan terdapat perluasan lainnya. Dalam model UTAUT terdapat empat variabel yaitu pengaruh sosial (*social influence*), kondisi fasilitas (*facilitating conditions*), harapan kinerja (*performance expectancy*), dan harapan usaha (*effort expectancy*) yang memprediksi penerimaan pengguna dan perilaku (Falwadiya & Dhingra, 2022). Selain itu, terdapat empat variabel moderator dalam UTAUT yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan (Pham & Dau, 2022). Kemudian Venkatesh et al pada tahun 2012 mengembangkan UTAUT-2 untuk mempelajari penerimaan dan penggunaan teknologi dengan menambahkan tiga variabel dalam model UTAUT yaitu kebiasaan (*habit*), motivasi hedonis (*hedonic motivation*), dan nilai harga (*price value*) (Falwadiya & Dhingra, 2022).

Penelitian ini mereplikasikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukherjee, et al., (2023). Hasil riset dari penelitian terdahulu diadopsi kemudian dimodifikasi dengan memunculkan variabel niat untuk

menggunakan teknologi sebagai variabel dependen dan kondisi yang memfasilitasi, pengaruh sosial, dan ekspektasi kinerja sebagai variabel independen. Menurut Sudarsono & Lestari (2018) kondisi fasilitas yang memadai akan meningkatkan penerimaan pengguna melalui manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Sedangkan pengaruh sosial akan menimbulkan keinginan dan dorongan untuk menggunakan teknologi apabila berdasarkan fakta bahwa sebagian besar orang di lingkungan mereka menggunakan teknologi tersebut (Tomić, et al., 2023). Apabila pengadopsian teknologi memberikan manfaat dalam bekerja dan membantu pekerjaan lebih efisien maka pengguna akan cenderung menggunakan teknologi tersebut, dengan kata lain semakin tinggi ekspektasi kegunaannya, semakin tinggi kemungkinan pengguna memilih untuk menggunakannya (Tomić, et al., 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan, penelitian ini dilakukan untuk menambah literatur dan menawarkan wawasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemerintah untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Di samping itu, analisis kesiapan adopsi blockchain dapat menambah referensi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk kesiapan penerapan teknologi blockchain. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pembaharuan sistem informasi akuntansi manajemen di sektor publik Indonesia terutama pada pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia?
2. Apakah pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia?
3. Apakah ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia.
2. Menguji apakah pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia.

3. Menguji apakah ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan teknologi blockchain pada implementasi SIAM di sektor publik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan teori UTAUT untuk menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam sistem informasi akuntansi manajemen.

2. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih dalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam sistem informasi akuntansi manajemen.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan bagi pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan teknologi blockchain dalam sistem informasi akuntansi manajemen pemerintah daerah.